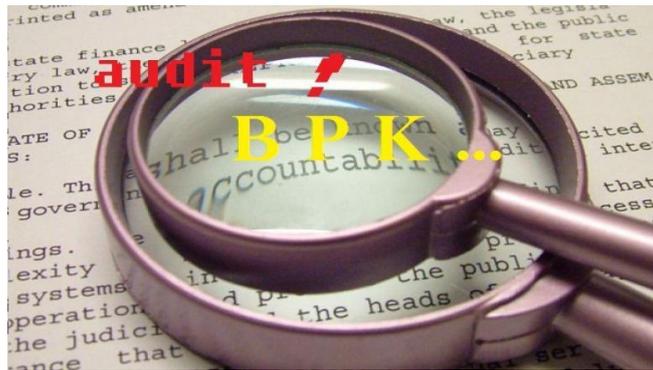


## ARHAWI KEMBALI TARGET WTP



*metrosulawesi.com*

Memasuki tahun kedua masa jabatannya sebagai Bupati Wakatobi, H. Arhawi memiliki target kerja untuk terus dicapainya. Salah satu yang masih membekas dan ingin terulang adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait tata kelola administrasi dan keuangan. Meski baru menjabat tahun 2016 lalu, penghargaan itu berhasil ia raih. Tahun inipun ia semakin optimis.

Ketua DPC PAN Wakatobi itu telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait. Tujuannya tak hanya mengevaluasi kinerja saja melainkan memantau perkembangan pengelolaan anggaran dari berbagai sumber yang ada. “Anggaran realisasi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tidak mengalami keterlambatan,” tegas Arhawi, kemarin.

Wakil Bupati Wakatobi periode 2011-2016 tersebut mengaku tak ingin masalah tahun lalu terulang kembali. Pasalnya keterlambatan penuntasan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), nyaris berakibat fatal.

Kita tahun lalu hampir tidak bisa raih WTP gara-gara laporan ADD/DD dan dana BOS. Meski masih kita raih WTP tapi saya tidak ingin hal itu terjadi lagi, “kata Arhawi mengingatkan. Wakatobi-1 itu menyadari, untuk mencapai target tersebut memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan. Sehingga ia berharap agar seluruh OPD dan pihak terkait bekerja keras dalam menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu.

### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Arhawi Kembali Target WTP*, Selasa 17 Oktober 2017

2. <http://rakyatsultra.fajar.co.id>, *Arhawi: Capaian WTP Karena Pengelolaan Keuangan Baik*, Senin 5 Juni 2017
3. <https://baubaupost.com>, *Wakatobi Pertahankan Opini WTP Tiga Tahun Beruntun*, Jumat 2 Juni 2017
4. <http://zonasultra.com>, *Tiga Tahun Berturut-turut Wakatobi Pertahankan Opini*, Rabu 31 Mei 2017

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini.
2. Opini merupakan simpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada :
  - kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  - kecukupan pengungkapan;
  - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
3. Dua kondisi utama penentu opini :
  - Pembatasan lingkup audit (kecukupan bukti), yaitu jika pemeriksa tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti audit yang mencukupi, dikarenakan dibatasi oleh entitas dan keadaan di luar kekuasaan pemeriksa maupun entitas;
  - Penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji), yaitu apabila laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
4. Tingkatan opini atas laporan keuangan terdiri dari :
  - Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;

- Wajar Dengan Pengecualian, yaitu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan;
- Tidak Wajar, yaitu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan;
- Tidak Menyatakan Pendapat, yaitu pernyataan menolak memberikan opini karena laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dengan demikian, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.